



Dana Desa Bukan untuk Pelesiran

Bangli (Bali Post) -

Para perbekel di Kabupaten Bangli harus mampu mengelola Dana Desa dengan baik dan transparan. Jangan sampai Dana Desa digunakan untuk jalan-jalan atau kunjungan kerja yang tidak jelas manfaatnya bagi pembangunan desa. Hal itu ditegaskan anggota DPR RI dari Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya di Bangli, Senin (23/4) kemarin.

Menurutnya, perbekel dilarang menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelesiran perangkat desa seperti yang terjadi di daerah lain di luar Bali. Pesan itu dilontarkannya untuk menghindarkan para perbekel dari kasus hukum.

Perbekel harus menggunakan Dana Desa sesuai aturan perundang-undangan. Pihaknya tidak ingin karena uang Rp 1 miliar, perbekel tersandung kasus hukum. Salah satu contoh penyimpangan Dana Desa yakni di Jawa Timur. Ada kepala Ddesa yang menggunakan Dana Desa untuk kegiatan pelesiran ke Malaysia. Hal

ini jelas melanggar aturan. Informasi mengenai hal ini, diperolehnya langsung dari BPK.

"Belakangan ini kerap terjadi Operasi Tangkap Tangan. Untuk itu, kami minta kepada seluruh perbekel maupun bupati agar bisa mengelola Dana Desa maupun keuangan dengan baik. Karena kalau berani menggunakan Dana Desa untuk jalan-jalan, maka saat pulang, perbekel harus berani dijemput oleh petugas penegak hukum dan siap-siap dapat makan gratis selama 5 tahun di penjara dan berpisah dari sanak saudara," tegasnya.

Lebih lanjut dia memberi-

kan apresiasi kepada desa-desa di Kabupaten Bangli yang terdapat menerapkan sistem keuangan desa (siskeudes) sesuai anjuran BPK. Sesuai informasi yang dapat dari Kepala DPMD Kabupaten Bangli, desa-desa di Bangli adalah

yang pertama di Bali yang menerapkan sistem ini. Hal ini sangat positif untuk kema-

juan pembangunan dan pengelolaan sistem keuangan di desa. (kmb41)



I Gusti Agung Rai Wirajaya

Bali Post/nan

Edisi : Selasa, 24 April 2018

Hal : 8